

# Wolfowitz Dalam Dinamika Hubungan Indonesia - Amerika

✓✓  
A.B. Susanto

Paul D. Wolfowitz's career path often collides with Indonesia's interest. Intensive interaction has tightened cultural relationship between Wolfowitz and Indonesia. The existing relation becomes a promising one for a better diplomatic relationship between Indonesia and America. This hope is expressed in the statements of Indonesia's officials in the mass media.

## Pendahuluan

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika dalam dua dekade terakhir ini tidak bisa dipisahkan dari sosok Paul Dundes Wolfowitz. Tepatnya sejak Wolfowitz ditunjuk Presiden Ronald Reagan menjadi duta besar Amerika di Jakarta untuk periode 1986-1989. Sejak itu perannya tak pernah sepi dalam mewarnai dinamika hubungan antara kedua negara. Apalagi Wolfowitz terpilih sebagai presiden dari Bank Dunia, lembaga yang mengurus proyek pendanaan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis dinamika hubungan diplomasi antara Indonesia dan Amerika melalui wacana yang berkembang di media massa terkait dengan sosok dan kebijakan yang diambil Wolfowitz. Hal ini berangkat dari hipotesis bahwa wacana yang berkembang di media massa mempengaruhi opini publik. Padahal dalam dekade terakhir ini diplomasi virtual berkontribusi dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia dan sejak bertahun-tahun sebelumnya telah berpengaruh pada kebijakan politik Amerika. Tonggak peristiwa yang diamati dimulai dari agenda demokratisasi di Indonesia menjelang pemilu 1999, isu terorisme pasca tragedi 11 September 2001, hubungan kemiliteran antara Indonesia-Amerika, dan dinominasikannya Wolfowitz sebagai presiden Bank Dunia.

## Kedekatan Wolfowitz dengan Indonesia

Magnet Indonesia begitu erat melekat tidak saja pada batin Paul D. Wolfowitz seorang tapi juga keluarganya. Kedekatan keluarga Wolfowitz itu merupakan kelanjutan pertalian erat mereka tatkala Wolfie (panggilan yang diberikan oleh George W Bush kepada Wolfowitz) menjadi duta besar Amerika di Jakarta. Clare Wolfowitz, sang istri di saat itu, adalah seorang antropolog pengagum candi Borobudur yang disertasinya berkenaan dengan penggunaan bahasa di pedesaan Jawa. Bahkan, putri bungsu mereka lahir pada saat Claire mendampingi Wolfowitz yang sedang bertugas sebagai duta besar Amerika untuk Indonesia.

## Agenda Demokratisasi di Indonesia

Sebagai Negara dengan jumlah penduduk ke empat terbesar di dunia, agenda demokratisasi di Indonesia menarik perhatian yang besar dari dunia, terutama Amerika Serikat. Wolfowitz selaku mantan duta besar AS untuk Indonesia pun tidak ketinggalan. Wolfowitz yang saat itu menjabat sebagai Dekan Paul Nitze School of Advanced International Studies di the Johns Hopkins University Washington DC bergabung dalam *International Republican Institute* (IRI) yang menaruh minat terhadap pemilu di Indonesia. IRI sendiri merupakan organisasi non pemerintah yang didirikan untuk memajukan demokrasi.

Salah satu aktivitas IRI di Indonesia adalah menyelenggarakan pelatihan saksi pemilu untuk partai-partai politik peserta pemilu. Seperti yang dilansir Kompas,<sup>1</sup> Wolfowitz menekankan betapa saksi di tempat pemungutan suara (TPS) mempunyai peran yang strategis dalam pelaksanaan pemilu.

Begitu pemilu tahun 1999 menelorkan pasangan Gus Dur-Mega sebagai pimpinan nasional, Wolfowitz juga menekankan pentingnya mengisi kabinet dengan orang-orang yang mampu dan jujur. Dalam suatu acara di Denpasar, Wolfowitz menegaskan bahwa pasar (internasional) menunggu apakah orang yang ditunjuk akan dapat menangani korupsi atau justru orang yang pernah terlibat dan bahkan akan melanjutkan praktek korupsi itu sendiri.<sup>2</sup>

### Isu Terorisme

Tragedi 11 September telah memberi warna baru dalam politik luar negeri Amerika Serikat. Dalam kapasitasnya sebagai deputi menteri pertahanan, Wolfowitz merupakan arsitek perang AS melawan terorisme. Wolfowitz adalah sosok vital yang menelorkan ide serangan jaga-jaga (*pre-emptive strike*) ke Irak dan Afghanistan.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia terkena singgungan dari kebijakan di atas. Tidak heran jika sentimen anti Amerika meningkat sebagai reaksi atas kebijakan tersebut. Bayangkan, begitu tragedi 11 September terjadi jajak pendapat yang dilakukan Gallup menyatakan hanya 5% orang Indonesia yang membenarkan aksi teroris tersebut. Survei *Pew Global Attitudes* yang diadakan pada tahun 2000 masih menunjukkan bahwa 75% orang Indonesia menyukai Amerika. Ironisnya, pada musim semi 2002, angka tersebut berubah menjadi 61% dan lebih parah lagi terjadi penurunan drastis sampai hanya menjadi 15% saja di musim panas 2003.<sup>3</sup>

Disinyalir ada miskomunikasi yang dilakukan Amerika terhadap penanganan isu terorisme ini dalam kaitannya dengan Indonesia. Seperti diketahui bersama, kehormatan (*dignity*) sangat dijunjung tinggi dalam kultur masyarakat Indonesia. Sekedar ilustrasi, bahasa tubuh yang dilakukan Michel Camdessus selaku direktur IMF pada saat penandatanganan *letter of intent* misalnya, telah menyinggung kehormatan bangsa Indonesia. Demikian halnya dengan pernyataan yang

<sup>1</sup> Wolfowitz: Strategi, Saksi Parpol di TPS, Kompas, 30 April 1999

<sup>2</sup> KCM, 23 October 1999. *Gus Dur Must Begin Something Totally New*

<sup>3</sup> Pintak, Lawrence. *The Communications Gap Between America and The World's Muslims*. Keynote address, International Conference on Muslims and Islam in the 21<sup>st</sup> Century: Image and Reality, International Islamic University, Kuala Lumpur, Malaysia, Aug. 6, 2004.

dikeluarkan baik oleh presiden George W. Bush maupun Wolfowitz sendiri dalam kaitannya dengan isu terorisme.

Tempo Interaktif<sup>4</sup> melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, secara resmi membantah pernyataan Deputy Menhan AS, Paul Wolfowitz, bahwa Indonesia memiliki potensi terorisme dan jaringan terorisme mendapatkan tempat bersembunyi di Indonesia. Bantahan tersebut diberikan sehari setelah terbitnya artikel di harian New York Times yang memuat hasil wawancara dengan Wolfowitz. Dalam wawancara tersebut ia mengatakan Amerika Serikat bisa memindahkan perhatian kepada wilayah yang melindungi kelompok teroris seperti Indonesia, Filipina, Somalia, dan Yaman. Masalah di Indonesia, kata Wolfowitz, muncul karena pertikaian antar agama di Sulawesi dan Maluku. "Di wilayah tersebut pemerintah sangat lemah," imbuhnya. "Anda melihat potensi ekstrimis Muslim dan teroris menemukan tempat kecil di negeri itu."

Harian Kompas<sup>5</sup> juga melaporkan klarifikasi pemerintah melalui menteri luar negeri Hassan Wirajuda. Bahwa selain kurang tepat, Amerika dinilai ketinggalan informasi mengenai dugaan keberadaan jaringan teroris internasional tersebut. Lebih jauh, pemerintah menilai pernyataan tentang adanya jaringan terorisme internasional belum merupakan sesuatu yang nyata tetapi baru sebatas adanya potensi terorisme internasional di Indonesia. Hassan juga membantah, pemerintah Indonesia terkesan tidak serius dan ragu-ragu dalam menumpas terorisme karena takut menghadapi reaksi keras dari kaum muslim.

Sebelum munculnya bantahan tersebut, Atase Pers Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Stanley Harsa, secara diplomatis menyatakan ungkapan Deputy Menteri Pertahanan AS, Paul Wolfowitz, bukan berarti Amerika Serikat akan menyerang negara seperti Indonesia, Filipina, Somalia, dan Yaman.<sup>6</sup>

Untuk meredakan ketegangan, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Richard Armitage, menjamin Gedung Putih tetap menilai Indonesia sebagai negara penting bagi AS.<sup>7</sup> Ia mengatakan, Indonesia memiliki peranan penting bagi kepentingan AS. Kepentingan itu bukan karena dugaan adanya sejumlah kelompok teroris di bumi Nusantara tersebut. Penilaian Armitage disampaikan kepada wartawan Indonesia yang mengunjunginya di Washington DC pada tanggal 16 Januari 2002. Penegasan itu terkait maraknya polemik soal posisi Indonesia di mata pemerintahan Presiden George W. Bush bahwa Indonesia bisa menjadi lahan subur bagi tumbuhnya kelompok-kelompok teroris.

Armitage buru-buru mengingatkan bahwa penilaian Wolfowitz itu bersifat umum. "Bukan cuma kepada Indonesia, dan sejumlah negara seperti Yaman, Filipina dan Somalia," kata dia. Armitage menambahkan bahwa asumsi mantan Duta Besar AS untuk Indonesia itu tak lepas dari besarnya jaringan dan sel-sel Al-Qaeda, yang di mata Gedung Putih giat mensponsori pelatihan dan bahkan aksi teror di sejumlah negara.

Dalam kesempatan berikutnya Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mendinginkan suasana dengan pernyataannya yang dimuat Tempo Interaktif.<sup>8</sup> Wirajuda menyatakan banyak pihak di Indonesia termasuk dari kalangan pers yang

<sup>4</sup> Menin Bantah Pernyataan Wolfowitz. TEMPO Interaktif, 9 Januari 2002.

<sup>5</sup> KCM, 09 Januari 2002, Menin: Pernyataan Paul Wolfowitz, Ketinggalan Zaman

<sup>6</sup> Pernyataan Wolfowitz Bukan Berarti AS Akan Menyerang Indonesia. TEMPO Interaktif, 8 Januari 2002.

<sup>7</sup> Wakil Menlu AS: Indonesia Tetap Partner Penting AS. TEMPO Interaktif, 17 Januari 2002.

<sup>8</sup> Menlu: Banyak Pihak Saleh Tafsir Wawancara Paul Wolfowitz. TEMPO Interaktif, 24 Januari 2002.

telah salah menafsirkan hasil wawancara pers dengan Paul Wolfowitz. Wirajuda mengaku telah membaca dengan sangat teliti seluruh teks wawancara itu, dan Wolfowitz tidak pernah mengatakan ataupun mengindikasikan Indonesia sebagai salah satu pusat terorisme maupun Indonesia sebagai target AS berikutnya dalam upaya meniadakan jaringan terorisme. Wolfowitz, kata Wirajuda, juga tidak terlalu menekankan pada keterkaitan antara elemen Al Qaeda dengan organisasi tertentu di Indonesia. Menurut Wirajuda, Wolfowitz justru menyatakan akan menjajaki kemungkinan kerja sama dengan negara-negara yang disebutkannya dalam memerangi terorisme.

Paul Wolfowitz sendiri tidak tinggal diam. Ia memberi jaminan tidak akan melakukan intervensi militer ke Indonesia untuk mengejar para teroris.<sup>9</sup> Hal ini disampaikannya pada Ketua PBNU, KH Hasyim Muzadi pada tanggal 9 Februari setelah menemuinya di Pentagon. Bahkan, dalam kesempatan lain, kendati sudah menyambut Yudhoyono di Pentagon beberapa saat sebelumnya, Wolfowitz tetap menyempatkan diri menghadiri perjamuan yang diselenggarakan USINDO pada bulan September 2003. Dalam perjamuan tersebut Wolfowitz melakukan *toast* untuk Yudhoyono. "Mari kita melakukan *toast* kepada Susilo Bambang Yudhoyono yang ikut menjaga transisi demokrasi untuk sebuah negara Indonesia yang lebih baik," kata Wolfowitz, sambil berdiri tegak dari sisi mejanya.<sup>10</sup>

### Isu Hubungan Militer Indonesia - Amerika

Sehubungan dengan diangkatnya Ketua Dewan Penyantun USINDO untuk Indonesia, Paul Wolfowitz, sebagai *Deputy Secretary of Defence* AS Megawati yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden berharap hubungan Indonesia-AS dapat membaik. Adanya embargo bantuan militer sejak 1999 (usai jajak pendapat di Timor Timur) menjadi ganjalan tersendiri untuk menciptakan hubungan yang baik, terutama di bidang militer. Untuk menyelesaikan persoalan embargo itu, Megawati mengusulkan diadakannya pertemuan antara para petinggi militer Indonesia dan Amerika.<sup>11</sup>

Sementara itu Pemerintah Amerika Serikat juga menganggap kerja sama militer dengan Indonesia dalam memerangi terorisme memang dibutuhkan. Namun, hal ini harus dilihat dalam kerangka di mana TNI terus merampungkan agenda reformasinya dan memahami perannya dalam proses demokrasi. Demikian antara lain kesimpulan yang bisa diambil dalam pertemuan Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Paul Wolfowitz dengan rombongan wartawan Indonesia di Departemen Pertahanan AS, Washington, pada tanggal 9 September 2003.<sup>12</sup>

Perlunya kerja sama militer yang lebih baik antara Indonesia dan Amerika Serikat juga diketengahkan sehubungan dengan adanya bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Indonesia. Kerja sama itu sangat dibutuhkan dalam penanganan pasca bencana sehingga bisa memberikan kemampuan untuk merespons lebih cepat penanganan bencana serupa di masa-masa mendatang. Kesulitan yang dialami Indonesia dalam penanganan pasca bencana akibat kondisi peralatan militer

<sup>9</sup> Wolfowitz Jamin Amerika Tidak akan Ganggu Indonesia. *TEMPO Interaktif*, 10 Februari 2002.

<sup>10</sup> Jawa Pos, 21 Sept 2003. AS Puas pada Yudhoyono: Soal Pemberantasan Teroris, Wolfowitz Angkat Toast

<sup>11</sup> Megawati Minta Embargo Militer AS Ditarok. *TEMPO Interaktif*, 19 Januari 2001.

<sup>12</sup> Meski Ada Perbedaan, Hubungan RI-AS Kuat, *Kompas*, 12 September 2003.

yang kurang mendukung ternyata belum merubah keputusan Amerika dalam embargonya terhadap Indonesia.

"Saya belum melihat peluang embargo militer akan dicabut," kata Wakil Menteri Pertahanan AS Paul Wolfowitz kepada wartawan.<sup>13</sup> Wolfowitz berkilah, "Bentuk dari kerja sama militer itu memiliki alternatif yang cukup banyak dan tidak tergantung pada pencabutan embargo perlengkapan militer."<sup>14</sup>

Dalam kaitan bantuan Amerika terkait gempa dan tsunami di Aceh, Abdurahman Wahid, mantan presiden Indonesia yang akrab dipanggil Gus Dur ini melancarkan spekulasi bahwa Amerika Serikat berniat membangun Pangkalan Militer di Pulau Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam. Spekulasi yang substansinya ditentang oleh Gus Dur dan kebenaran spekulasi itu sendiri dibantah oleh Wolfowitz. "Kami tidak memiliki agenda tersembunyi, termasuk dalam membuat pangkalan perang AS di Aceh," sanggah Wolfowitz.<sup>15</sup> Wolfowitz menegaskan, pasukan AS berada di Aceh bukan bertujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan militer, melainkan hanya untuk membantu mengoperasikan peralatan yang ada. "Selain mengirimkan tentara, kami juga mengirimkan relawan sipil untuk membantu para korban," ujarnya kepada wartawan.<sup>16</sup>

Dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Deputi Menteri Pertahanan AS Paul Wolfowitz, dibahas mengenai pengiriman alat-alat perang ke Indonesia yang masih terhambat sebagai akibat embargo AS. "Konggres, LSM, dan berbagai media AS masih khawatir dengan stigma terhadap TNI yang otoriter selama pemerintahan Soeharto," jelas Juwono. Meski begitu, dalam rangka rehabilitasi di Aceh sebagian suku cadang Hercules dan helikopter sudah tiba di Indonesia.<sup>17</sup> Sebetulnya embargo bagi peralatan militer yang *non-lethal* (yang tidak mematikan) sudah dicabut pada September 2001, ketika Megawati berkunjung ke Washington. Tetapi dalam implementasinya, pembelian *spareparts* yang *note bene* bukan benda yang mematikan, seperti Hercules yang merupakan pesawat angkut, proses administrasinya juga tidak mudah.

Pemerintah Amerika Serikat menghargai upaya pemerintah Indonesia dalam mereformasi TNI. Selain itu, AS juga sangat gembira atas pernyataan TNI yang akan menjaga profesionalisme serta berkomitmen untuk tetap netral dalam pemilihan umum yang sedang berlangsung. Hal itu mengemuka dalam Dialog Pertahanan dan Keamanan RI-AS ke-2 yang berlangsung di Washington, DC, 22-23 April 2004, atas usulan Megawati dalam kunjungannya ke Washington DC. Dialog itu juga dihadiri Wakil Menteri Pertahanan AS Paul Wolfowitz yang mewakili Menhan Donald Rumsfeld.

Dialog pertama telah digelar di Indonesia pada April 2002. Dalam pertemuan tersebut, delegasi AS memberikan paparan beberapa aspek strategis keamanan nasional mereka serta perubahan bentuk pertahanan global AS. Sedang Indonesia menjelaskan soal keamanan nasional dan isu kontra teroris regional.

Operasi militer di Aceh dan kontroversi masalah keamanan Selat Malaka juga menjadi salah satu topik paparan delegasi Indonesia dalam dialog ke dua.

<sup>13</sup> Belum Ada Peluang AS Cabut Embargo Militer RI, detikNews, 5 September 2005.

<sup>14</sup> Wolfowitz: Bencana Tsunami Perlihatkan Pentingnya Kerja Sama Militer RI-AS, Kompas 17 Januari 2005.

<sup>15</sup> Gus Dur Bertemu Paul Wolfowitz, Minggu, TEMPO Interaktif, 16 Januari 2005.

<sup>16</sup> AS Sangkal Pankahnya di Aceh untuk Tujuan Militer, detikcom, 5 September 2005.

<sup>17</sup> detikcom - Bertemu Wolfowitz, Menhan Bahas Embargo Militer, 09/09/2005.

Khusus masalah keamanan Selat Malaka, delegasi Indonesia meminta klarifikasi pihak AS atas kebijakan keamanan mereka di Selat Malaka. Pihak AS memberikan jaminan akan menghormati kedaulatan Indonesia dan setuju untuk terus berkonsultasi dengan RI dan negara-negara di kawasan tersebut.

Kedua belah pihak juga menyetujui pertemuan kembali antara TNI dengan Komando Armada Pasifik AS (USPACOM) dalam kerangka Dialog Pertahanan Bilateral (Bilateral Defense Dialog/BDD). Selanjutnya, hasil-hasil pertemuan antara TNI dan USPACOM tersebut akan dibawa dalam dialog Pertahanan dan Keamanan RI-AS ke-3 yang rencananya akan diadakan pada tahun 2005.<sup>18</sup>

### Isu Pencalonan Wolfowitz menjadi Presiden Bank Dunia

Pencalonan Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat Paul Wolfowitz sebagai Presiden Bank Dunia tidak hanya mengejutkan, tetapi sekaligus mengundang kontroversi. Akar terdalam atas silang pendapat itu terletak pada peran Wolfowitz sebagai salah satu arsitek Perang Irak. Kontroversi atas pencalonan Wolfowitz sesungguhnya mengingatkan kembali akan kasus serupa yang menimpa Robert McNamara hampir 40 tahun sebelumnya. McNamara yang menjadi Menteri Pertahanan AS pada masa Perang Vietnam dicalonkan Presiden Lyndon Johnson menjadi Presiden Bank Dunia.

Mayoritas media massa di Indonesia melaporkan kontroversi tersebut. Namun, dalam berbagai pemberitaan, porsi pemaparan lebih banyak diberikan pada resistensi terhadap pencalonan Wolfowitz dibandingkan dengan dukungan padanya. Reaksi negatif terutama bersumber dari dari lembaga dan negara-negara yang menentang penyerangan Amerika Serikat ke Irak. Umumnya, termasuk di Indonesia, muncul suara-suara yang mencermaskan menguatnya politik-ekonomi unilateral AS serta semakin "merasuknya" kebijakan-kebijakan neoliberalisme dalam program-program Bank Dunia.<sup>19</sup> Apalagi Bank Dunia merupakan isu penting dalam konteks *a better world system*.<sup>20</sup> Seperti diketahui, Amerika Serikat merupakan pemegang saham terbesar di Bank Dunia. Disusul Jepang, Jerman, Inggris, dan Perancis. Berdasarkan tradisi, Washington memilih presiden Bank Dunia dan Eropa memilih kepala IMF.

Dalam pernyataannya, Wolfowitz berusaha menyingkirkan semua kekhawatiran pihak luar, dengan mengatakan bahwa ia tidak akan memaksakan agenda AS di Bank Dunia dan siap mendengarkan "beragam pandangan (dari siapapun)." Wolfowitz juga menolak anggapan bahwa ia akan mengubah kebijakan Bank Dunia. "Saya sangat peduli dengan penyebaran kebebasan dan demokrasi. Saya pikir ada arus politik dan juga arus ekonomi, di mana keduanya saling memperkuat. Bila saya menjadi presiden Bank Dunia, saya tahu di arus mana saya harus berkonsentrasi," kata Wolfowitz kepada *The Washington Post*.<sup>21</sup> Dia akan memetik pelajaran dari krisis keuangan di Asia dan ingin tahu apakah ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk menghindari terulangnya krisis serupa itu.<sup>22</sup>

<sup>18</sup> AS Hargal Upaya Pemerintah RI Mereformasi TNI, *detikNews*, 5 September 2005.

<sup>19</sup> Pencalonan Wolfowitz Dinilai Mengirikan, *TEMPO Interaktif*, 18 Maret 2005.

<sup>20</sup> RI Belum Ambil Sikap Soal Calon Presiden Bank Dunia, *Detikcom*, 5 September 2005.

<sup>21</sup> Reaksi atas Pencalonan Wolfowitz, *Kompas* 18 Maret 2005

<sup>22</sup> Wolfowitz: Saya Tak Akan Rombak Bank Dunia, *Kompas*, 21 Maret 2005.

Dalam suatu jumpa pers, presiden George W. Bush menyatakan bahwa ia memilih Wolfowitz karena tokoh itu "komit terhadap pembangunan" dan merupakan seorang tokoh yang "memiliki *compassion* serta sopan". Sebagai tokoh nomor dua di Pentagon, kata Bush, Wolfowitz telah menunjukkan kemampuan untuk mengatur sebuah institusi besar.

Tanggapan pemerintah Indonesia atas pencalonan itu sendiri relatif positif dan cenderung menaruh banyak harapan. Bagaimanapun Wolfowitz mempunyai banyak sahabat di Indonesia, lebih-lebih karena pernah menjadi duta besar di Jakarta.<sup>23</sup> "Bagi Indonesia, terutama kalangan diplomat, Paul Wolfowitz bukan orang asing lagi," kata Menteri Keuangan Jusuf Anwar.<sup>24</sup> Begitu pun tanggapan pemerintah Indonesia begitu Bank Dunia menyetujui dipilihnya Paul Wolfowitz sebagai Presiden baru untuk periode lima tahun, terhitung dari 1 Juni 2005. "Wolfowitz bukan orang asing di Indonesia. Beliau itu mantan Dubes AS untuk Indonesia, mempunyai banyak teman di Indonesia, sangat mengenal Indonesia. Tentu kita harapkan Pak Wolfowitz akan tetap menjadi teman kita, dan Indonesia mengharapkan siapa pun yang memimpin Bank Dunia mempunyai perhatian kepada negara dunia ketiga," ungkap Juru Bicara Deplu RI Yuri Thamrin.<sup>25</sup>

### Analisis

Betapa besarnya pengaruh Amerika di dunia internasional tidak dapat disangsikan lagi. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyatakannya dalam pidatonya dalam jamuan makan malam yang diselenggarakan USINDO. Betapa *hyperpower*-nya Amerika disebutnya di setiap bidang, mulai dari ekonomi, anggaran pertahanan, intelijen, dan mesin diplomasi.<sup>26</sup>

Perbandingan yang tidak berimbang antara kekuatan Amerika dan Indonesia menentukan pola hubungan yang terjalin. Hubungan bilateral lebih didominasi oleh superioritas Amerika terhadap Indonesia. Dalam posisi lemah seperti ini *lobbying* menjadi salah satu tumpuan dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia dalam hubungannya dengan Amerika. Untuk kepentingan *lobbying* tersebut jejaring (*networking*) yang kuat dan luas memegang peran sangat vital.

Hal ini terutama karena *lobbying* pada dasarnya merupakan usaha-usaha yang dilaksanakan untuk dapat mempengaruhi pihak-pihak tertentu dengan tujuan memperoleh hasil yang *favorable*. *Favorable* di sini tidak berarti selalu harus secara langsung mencapai sasaran yang diinginkan. Akan tetapi lebih pada pembentukan sudut pandang positif terhadap topik *lobbying* dari kaca mata pandang pihak-pihak yang menjadi sasaran atau target *lobbying*. Selanjutnya secara berantai diharapkan memberikan dampak positif pula bagi pencapaian tujuan. Jadi sebenarnya *lobbying* mempengaruhi target yang dilobi agar mempunyai sikap yang positif dan tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tapi juga jangka panjang.

Setiap aktivitas *lobbying* selalu didahului, disertai dan diakhiri oleh adanya 'kontak', baik untuk *lobbying* formal maupun informal. Selanjutnya, dalam setiap aktivitas *lobbying* selalu terkandung tujuan untuk menciptakan "pengaruh" positif

<sup>23</sup> Tajuk rencana: Silang Prudapat atas Pencalonan Paul Wolfowitz, Kompas, 19 Maret 2005.

<sup>24</sup> Reaksi atas Pencalonan Wolfowitz, Kompas 18 Maret 2005.

<sup>25</sup> Paul Wolfowitz Menjadi Presiden Bank Dunia, Kompas 2 April 2005.

<sup>26</sup> Usado Report, Keynote Address By H. E. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono President Of The Republic Of Indonesia At A Dinner Tendered By Usindo, Washington DC, 23 May 2005.

melalui berbagai strategi dan taktik yang diterapkan. Dalam kerangka inilah, kedekatan Wolfowitz dengan Indonesia mendapatkan konteksnya.

Salah satu yang paling krusial adalah dalam kaitannya dengan isu terorisme. Terutama jika Wolfowitz dipandang sebagai personifikasi dan representasi dari budaya *Judeo-Christian* di satu sisi dan Indonesia dianggap mewakili peradaban Timur/Islam maka kedua belah pihak berada dalam posisi konfrontasi secara diametral. Posisi yang berseberangan ini tidak lepas dari wacana perang peradaban yang dikembangkan kalangan neo konservatif.

Seperti diketahui, para intelektual neo-konservatif merumuskan rancangan tata politik internasional berbasis pada teori "clash of civilizations." Bernard Lewis adalah orang pertama yang mempopulerkan wacana ini melalui artikelnya berjudul "The Roots of Muslim Rage" (Akar-akar kemarahan Muslim) di jurnal *Atlantic Monthly*, September 1990. Gagasan Lewis ini kemudian dipopulerkan oleh Huntington melalui bukunya "The Clash of Civilization and the Remaking of World Order" (1996).<sup>27</sup>

Huntington melihat potensi-potensi konflik yang akan timbul dengan adanya globalisasi. Ia melihat tatanan dunia baru ini akan dipenuhi oleh berbagai macam konflik yang tidak lagi bermotif ekonomi, tetapi mengacu kepada budaya dan juga agama. Dia melihat kebangkitan Asia yang didominasi oleh nilai-nilai konfusianisme dan juga kebangkitan Islam di Timur Tengah dan Asia Tengah membuat Barat (baca: Amerika) tidak lagi mempunyai pengaruh tunggal dalam perjalanan sejarah dunia. Karena masing-masing kutub-kutub peradaban ini mempunyai asumsi dan nilai yang berbeda satu sama lain, konflik yang terjadi sering kali tidak dapat dihindarkan.

Dalam kerangka itu, Tata Dunia Baru (The New World Order) banyak disikapi sebagai rekayasa hegemoni sebuah "American Empire." Termasuk peran Paul Wolfowitz dalam menyusun Rancangan Pertahanan yang ditujukan untuk mencegah munculnya rival baru bagi AS. Dalam pernyataannya pada 20 September 2001, Presiden George W. Bush mengungkapkan, "Every nation in every region now has a decision to make: Either you are with us, or you are with the terrorist. From this day forward, any nation that continues to harbor or support terrorism will be regarded by the United States as a hostile regime."

Kebijakan luar negeri tersebut, berdasarkan kaidah manajemen dapat dikatakan sebagai "carrot and stick policy", siapa yang menurut akan mendapatkan imbalan (dijadikan teman dan mendapatkan kemudahan) sementara pihak yang membangkang akan dihukum. Dengan perspektif 'the clash of civilization', kebijakan tersebut menuntun kepada *constructed reality*. Ketika terorisme dirancang oleh sekelompok orang berpandangan ekstrim tetapi digeneralisasikan sebagai tindakan dari 'peradaban' lain. Padahal, kenyataannya negara dan masyarakat yang dikaitkan dengan terorisme sebenarnya merupakan korban dari terorisme, yang barangkali dilakukan sekelompok kecil warganya.

Untuk menghadapi kebijakan keras dan kaku seperti di atas, intuisi, fleksibilitas dan sensitivitas dalam mengelola situasi merupakan elemen-elemen pendukung kesuksesan suatu *lobbying*. Di samping tentu saja *Entertainment, Situation, Message, dan Follow up action* (The Jakarta Consulting Group's

<sup>27</sup> Huntington dalam AB. Susanto, 1995. *Visi Global Para Pemimpin: Sintetisisme Peradaban*. Jakarta. Elex Media Komputindo

*Lobbying Mix*). Dalam hal ini, seringkali *lobbying* berperan sebagai langkah awal dari negosiasi. Kekuatan negosiasi sendiri terletak pada fokusnya, yaitu yang bertumpu pada pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan. Ketrampilan bernegosiasi terletak pada kemampuan untuk memunculkan kekuatan persuasi atau faktor *intellectual non-aggressiveness* yang melekat dan menolak adanya pemanfaatan *crude power*. Kenyataannya, tidak mudah untuk menciptakan suasana *win-win* menuju pada kesepakatan bersama, apalagi yang dihadapi adalah kekuatan *hyperpower* Amerika.

### Kesimpulan

Kepentingan nasional sebagai negara *hyperpower* membuat diplomasi Amerika terbiasa dengan gaya komunikasi yang cenderung hegemonik dan kurang peka terhadap pihak lain. Hal ini nampak dalam kaitannya dengan isu terorisme, hubungan militer antara kedua negara dan pencalonan Wolfowitz sebagai presiden Bank Dunia. Kedekatan Wolfowitz dengan Indonesia menjadi tumpuan harapan bagi hubungan diplomatik yang lebih baik antara Indonesia dan Amerika saat Wolfowitz menduduki jabatan strategis. Kedekatan tersebut memberi peluang lebih besar untuk kepentingan *lobbying*.

### Daftar Kepustakaan

- "AS Hargai Upaya Pemerintah RI Mereformasi TNI", artikel *Detikcom*, 9 Mei 2005.
- "AS Puas pada Yudhoyono: Soal Pemberantasan Teroris, Wolfowitz Angkat Toast", artikel *Jawa Pos*, 21 September 2003.
- "AS Sangkal Pasukannya di Aceh untuk Tujuan Militer", artikel *Detikcom*, 9 Mei 2005.
- "Belum Ada Peluang AS Cabut Embargo Militer RI", artikel *Detikcom*, 9 Mei 2005.
- "Bertemu Wolfowitz, Menhan Bahas Embargo Militer", artikel *Detikcom*, 9 Mei 2005.
- "Gus Dur Bertemu Paul Wolfowitz. Minggu", artikel *TEMPO Interaktif*, 16 Januari 2005.
- "Gus Dur Must Begin Something Totally New", artikel *KCM*, 23 Oktober 1999.

---

\* Huntington dalam AB. Susanto. 1998. *Ulu Global Para Pemimpin: Simbolisme Peradaban*. Jakarta, Elex Media Komputindo

"Megawati Minta Embargo Militer AS Dicabut", artikel *TEMPO Interaktif*, 19 Januari 2001.

"Menlu Bantah Pernyataan Wolfowitz", artikel *TEMPO Interaktif*, 9 Januari 2002.

"Menlu: Banyak Pihak Salah Tafsir Wawancara Paul Wolfowitz," artikel *TEMPO Interaktif*, 24 Januari 2002.

"Menlu: Pernyataan Paul Wolfowitz Ketinggalan Zaman", artikel *KCM*, 9 Januari 2002.

"Meski Ada Perbedaan, Hubungan RI-AS Kuat", artikel *Kompas*, 12 September 2003.

"Paul Wolfowitz Menjadi Presiden Bank Dunia", artikel *Kompas*, 2 April 2005.

"Pencalonan Wolfowitz Dinilai Mengerikan", artikel *TEMPO Interaktif*, 18 Maret 2005.

"Pernyataan Wolfowitz Bukan Berarti AS Akan Menyerang Indonesia," artikel *TEMPO Interaktif*, 08 Januari 2002.

Pintak, Lawrence. The Communications Gap Between America and The World's Muslims. Keynote address, *International Conference on Muslims and Islam in the 21<sup>st</sup> Century: Image and Reality*, International Islamic University, Kuala Lumpur, Malaysia, Aug. 6, 2004

"Reaksi atas Pencalonan Wolfowitz," artikel *Kompas*, 18 Maret 2005.

"RI Belum Ambil Sikap Soal Calon Presiden Bank Dunia," artikel *Detikcom*, 9 Mei 2005.

"Silang Pendapat atas Pencalonan Paul Wolfowitz", tajuk rencana *Kompas* 19 Maret 2005.

Susanto, A.B. 1997. *Manajemen Aktual: Topik-Topik Aktual Manajemen dalam Riak Perubahan*. Jakarta. PT. Grasindo.

Susanto, A.B. 1998. *Visi Global Para Pemimpin: Sinkretisme Peradaban*. Jakarta. Elex Media Komputindo

Transkripsi Keterangan Pers Menteri Luar Negeri RI (DR. N. Hassan Wirajuda) dalam Rangka Kunjungan Kehormatan Delegasi Kongres Amerika Serikat ke Jakarta, 9 Januari 2005.

Usindo Report, Keynote Address By H.E. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono President Of The Republic Of Indonesia At A Dinner Tendered By Usindo, Washington DC,

25 May 2005.

“Wakil Menlu AS: Indonesia Tetap Partner Penting AS,” artikel *TEMPO Interaktif*, 17 Januari 2002.

“Wolfowitz: Bencana Tsunami Perlihatkan Pentingnya Kerja Sama Militer RI-AS”, artikel *Kompas*, 17 Januari 2005.

“Wolfowitz Jamin Amerika Tidak akan Ganggu Indonesia,” artikel *TEMPO Interaktif*, 10 Februari 2002.

“Wolfowitz: Saya Tak Akan Rombak Bank Dunia,” artikel *Kompas*, 21 Maret 2005.

